

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA KEISTIMEWAAN
(DANAIS) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2013-2018.**

RINGKASAN SKRIPSI



NADIA AMANI UFAIRA

NIM. 1116 29054

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2020**

SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),
DAN DANA KEISTIMEWAAN (DANAIS) TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA TAHUN 2013-2018**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NADIA AMANI UFIRA

No Induk Mahasiswa: 111629054

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 19 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Tri Ciptaningsih, SE., MM., Ak., CA.

Penguji

Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

INTISARI

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DANAIS) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi Daerah Istimewa. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, dengan jumlah sampel 6 yang diambil dari tahun 2013-2018. Jenis data merupakan data sekunder dan data *time series*. Data diperoleh dari Kantor BPKA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dianalisis merupakan data yang diolah dari Laporan Realisasi APBD. Pada data tersebut dilakukan uji asumsi klasik, setelah itu dilakukan uji hipotesis yang meliputi uji R^2 , uji t, dan uji F. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Keistimewaan (DANAIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan (DANAIS) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata kunci: DAU, DAK, DANAIS, Kemandirian Keuangan Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 283 UU 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tertulis bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Untuk menilai apakah tugas pemerintah daerah dilaksanakan dengan baik atau tidak, pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan daerah, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam rangka menganalisis kemampuan pemerintah daerah dalam urusan pengelolaan keuangan daerah, bisa memanfaatkan Analisis rasio keuangan. Penulis memutuskan untuk menggunakan Rasio Kemandirian sebagai alat analisis guna mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerahnya pada penelitian ini. Rasio Kemandirian keuangan daerah yakni kondisi dimana daerah mampu mendanai kegiatannya secara independen, seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah (Halim, 2002).

Penting halnya bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dana untuk kepentingan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya dalam rangka mewujudkan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah mengingat kemandirian keuangan daerah ditentukan oleh perbandingan antara PAD dengan sumber pendapatan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lain. Apabila rasio kemandiriannya tinggi, hal tersebut menggambarkan ketergantungan yang rendah terhadap pihak lain. Begitu juga dengan sebaliknya.

Kemandirian keuangan daerah memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yakni DAU, DAK, dan DANAIS. DAU berasal dari pendapatan dalam APBN, yang diberikan guna meratakan kemampuan keuangan antardaerah. selain itu, DAU dapat digunakan sebagai pendanaan atas keperluan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Begitu pula dengan DAK yang juga berasal dari pendapatan APBN. Tujuan pemberian DAK yaitu sebagai pendanaan atas kegiatan khusus yang termasuk dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DANAIS merupakan dana yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang diberikan guna pendanaan atas kewenangan istimewa, hal ini didasarkan pada Pergub DIY No. 33 Tahun 2016.

DAU dan DAK diharapkan dapat mengatasi kesenjangan fiskal, yakni selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Namun, hal ini justru menyebabkan pemerintah daerah semakin bergantung pada DAU dan DAK dibandingkan dengan PAD dalam hal pendanaan belanja daerah. Apabila DAU dan DAK yang dialokasikan pemerintah pusat semakin besar, maka ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat akan meningkat yang kemudian mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Ariani dan Putri (2016), yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa apabila DAU semakin tinggi, maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah. Kemudian, penelitian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

oleh Marizka (2013) juga menyimpulkan bahwa apabila DAK semakin tinggi, maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah. Melihat dari latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DANAIS) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018”**.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yakni:

- a. Apakah DAU berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018?
- b. Apakah DAK berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018?
- c. Apakah DANAIS berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018?
- d. Apakah DAU, DAK, dan DANAIS berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018?

Tujuan Penelitian

Berikut merupakan beberapa tujuan dari penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Mengetahui pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Mengetahui pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018.
- c. Mengetahui pengaruh DANAIS terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018.
- d. Mengetahui secara bersama-sama pengaruh DAU, DAK, dan DANAIS terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY pada tahun 2013-2018.

Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang penulis harap bisa dipetik dari penelitian ini, yakni:

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pendanaan kegiatan otonomi daerahnya dan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan sehubungan dengan kewenangannya dalam pelaksanaan APBD. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membuat keputusan mengenai kebijakan DAU, DAK dan DANAIS.
- b. Dapat digunakan untuk menambah wawasan berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah bagi kepentingan akademik.
- c. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel yakni DAU, DAK, dan DANAIS. Hasil penelitian diharapkan mampu menyempurnakan serta menguatkan penelitian yang sudah ada serta menambah wawasan. Pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian mengenai DANAIS sebelumnya yang ditulis oleh Prastiwi dan Aji (2020), penulis tersebut menggunakan rumus kemandirian keuangan yang mengukur perbandingan antara PAD dengan Bantuan Pemerintah Pusat, sedangkan pada penelitian ini, akan digunakan rumus kemandirian keuangan daerah yang mengukur perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Alokasi Umum

Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan dengan maksud untuk meratakan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai keperluan daerah atas pelaksanaan desentralisasi disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU termasuk dari salah satu dana perimbangan. Jumlah DAU ditentukan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus

Dicantumkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diberikan kepada daerah tertentu dan dimaksudkan guna membantu pendanaan atas kegiatan khusus yang termasuk dalam urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi dalam dua jenis, yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik).

Dana Keistimewaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah menyediakan Dana Keistimewaan (DANAIS) dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan keistimewaan yang diperoleh Provinsi DIY. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki Provinsi DIY merupakan keistimewaan yang dimaksud, hal ini didasarkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur serta mengurus kewenangan istimewa, yakni wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi DIY.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan yakni kondisi dimana pemerintah daerah mampu mendanai sendiri kegiatannya (Halim, 2002). Selain itu, kemandirian keuangan juga merupakan situasi dimana pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sumber dananya pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Untuk memenuhi definisi tersebut, pembilang dari rasio ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan untuk penyebutnya yaitu Total Pendapatan Daerah (Ritonga dkk., 2012). Berikut adalah rumus dari rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Ariani dan Putri (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa DAU seharusnya dapat dijadikan pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun, pemberian DAU justru

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membuat pemerintah daerah lebih bergantung kepada pemerintah pusat yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemandirian keuangan pada suatu daerah. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Ariani dan Putri (2010) yang menyimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan apabila DAU yang diberikan berkurang, maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Sesuai dengan penjelasan dari hasil penelitian yang sudah diuraikan, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Tujuan dari pemberian DAK kepada daerah adalah sebagai pendanaan atas kegiatan khusus (Sari, 2015). Selain itu, DAK juga digunakan sebagai pendanaan atas kebutuhan fisik daerah. Menurut Yulianto (2018), rendahnya kemampuan PAD dalam hal pembiayaan adalah penyebab dari penerimaan DAK yang besar. Semakin besar pemerintah pusat memberikan DAK kepada daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini didukung oleh penelitian Sari (2015) dan Yulianto (2018) dimana hasil dari kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa DAK mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

semakin rendah DAK yang diberikan, maka kemandirian keuangan daerah semakin tinggi. Sesuai penjelasan dari hasil penelitian yang sudah diuraikan, penulis dapat merumuskan hipotesis, yakni:

H₂: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Hubungan Dana Keistimewaan (DANAIS) dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan keistimewaan menyediakan Dana Keistimewaan (DANAIS) DIY. Menurut Prastiwi dan Aji (2020), pengalokasian dana keistimewaan telah diatur melalui mekanisme transfer ke daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kariem dan Purwaningsih (2018), diuraikan bahwa peningkatan DANAIS pada tiap tahunnya tidak memiliki dampak signifikan pada angka kesenjangan sosial serta kemiskinan pada Provinsi DIY. Kemudian, pada penelitian oleh Prastiwi dan Aji (2020), dijelaskan bahwa pemberian DANAIS yang meningkat tiap tahunnya berbanding terbalik dengan kemandirian keuangan daerah. Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, penulis dapat merumuskan hipotesis yakni:

H₃: Dana Keistimewaan (DANAIS) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DANAIS) dengan Kemandirian Keuangan Daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian oleh Susanti, Rahayu, dan Yudowati (2016), menyimpulkan bahwasanya PAD, DAU, dan DAK secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian, penelitian oleh Prastiwi dan Aji (2020) menyimpulkan bahwasanya PAD, Dana Perimbangan dan DANAIS secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan, penulis dapat merumuskan hipotesis, yakni:

H₄: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DANAIS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penulis menganalisis pengaruh dari DAU, DAK, dan DANAIS terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi DIY. Penelitian ini mencakup 6 periode yaitu dari tahun 2013-2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel dan Data Penelitian

Populasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, digunakan teknik pengambilan sampel yakni metode sampling jenuh karena jumlah populasi kurang dari 30 atau dengan arti lain sampel yang diambil menggunakan seluruh populasi. Digunakan jenis data *time series* yang diambil pada tahun 2013 sampai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan 2018. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Penulis menggunakan data berupa dokumen realisasi APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018. Data diperoleh dari instansi daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Berikut merupakan jenis variabel pada penelitian ini beserta operasional variabel untuk menunjukkan cara mengukur suatu variabel:

a. Variabel Independen

1. Dana Alokasi Umum (DAU): diukur berdasarkan total realisasi DAU yang didapatkan pada setiap periode anggaran.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK): diukur berdasarkan total realisasi DAK yang didapatkan pada setiap periode anggaran.
3. Dana Keistimewaan (DANAIS): diukur berdasarkan total realisasi dana keistimewaan yang diperoleh pada setiap periode anggaran.

b. Variabel Dependen

1. Kemandirian Keuangan Daerah: diukur menggunakan PAD yang diperoleh dibagi dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada setiap periode anggaran.

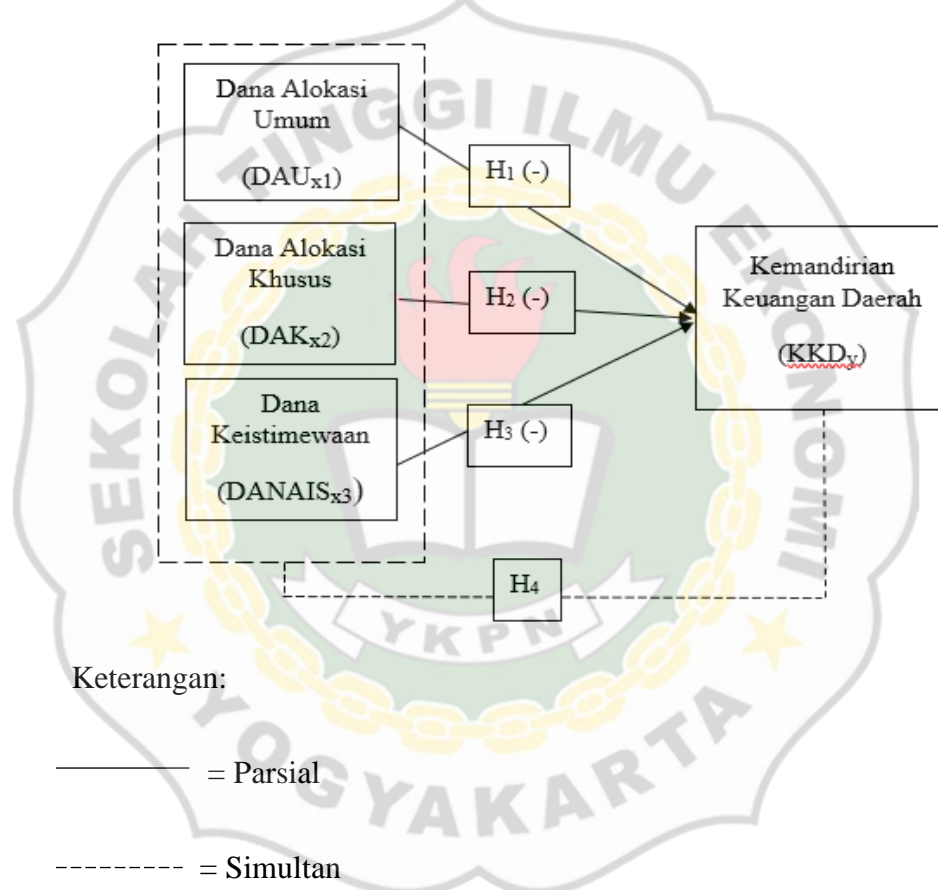
Model Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan model penelitian berupa penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kuantitatif yakni metode penelitian yang berguna untuk meneliti pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

populasi atau sampel tertentu, metode tersebut dalam mengumpulkan datanya memanfaatkan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dan memiliki tujuan yakni menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

Gambar 1 Model Penelitian



Metode dan Teknik Analisis

Penulis memilih untuk memanfaatkan metode regresi linear berganda sebagai metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut hasil pengujian, tingkat signifikansi (Sig.) yang didapatkan adalah 0,200 yang mana angka tersebut menunjukkan angka yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi penelitian (α) 0,05. Artinya, data memiliki distribusi yang normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut hasil pengujian multikolinearitas, nilai *tolerance* dari tiap variabel independen menunjukkan angka 0,191, 0,298, dan 0,230 yang lebih tinggi dari 0,10. Jika dilihat dari nilai VIF, tiap variabel independen menunjukkan angka 5,245, 3,356, dan 4,353 yang lebih rendah dari 10. Dari kedua hal ini bisa disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Menurut hasil dari pengujian yang telah dilakukan, tingkat signifikansi penelitian (α) 0,05 lebih rendah dari tingkat signifikansi (Sig.) yang menunjukkan angka 0,648. Hal ini membuktikan bahwa H_0 gagal ditolak. Dengan kata lain, residual acak atau tak terdapat autokorelasi antar nilai residual.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut hasil pengujian, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat signifikansi (Sig.) seluruh variabel independen yakni 0,051, 0,201, dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

0,474 lebih tinggi dari tingkat signifikansi penelitian (α) 0,05. Kesimpulan tersebut mengartikan bahwa tak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Hasil menunjukkan bahwa nilai R^2 (*R square*) = 0,997. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah dalam penelitian ini yang dapat diterangkan oleh variabel DAU, DAK, dan DANAIS adalah sebesar 99,7%. Sisanya, sebanyak 0,3% dijabarkan oleh variabel selain yang terdapat dalam model regresi penelitian.

Uji T

- 1) Pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (H_1)

Jika dilihat pada tabel, tingkat signifikansi (Sig.) yang dihasilkan adalah sebesar $0,009 < \text{tingkat signifikansi penelitian } (\alpha) 0,05$. Hal tersebut menyimpulkan H_1 diterima.

- 2) Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (H_2)

Jika dilihat pada tabel, tingkat signifikansi (Sig.) yang dihasilkan adalah sebesar $0,035 < \text{tingkat signifikansi penelitian } (\alpha) 0,05$. Hal tersebut menyimpulkan H_2 diterima.

- 3) Pengaruh DANAIS terhadap Kemandirian Keuangan (H_3)

Jika dilihat pada tabel, tingkat signifikansi (Sig.) yang dihasilkan adalah sebesar $0,081 > \text{tingkat signifikansi penelitian } (\alpha) 0,05$. Hal tersebut menyimpulkan H_3 ditolak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1 Uji T

Hipotesis	Variabel	Tingkat Sig.		Keputusan
		Sig.	α	
H ₁	DAU	0,009	0,05	H ₁ diterima
H ₂	DAK	0,035	0,05	H ₂ diterima
H ₃	DANAIS	0,081	0,05	H ₃ ditolak

Berdasarkan output dari regresi, diperoleh persamaan matematis

yakni:

$$Y = 13,894 - 0,551X_{1t} - 0,026X_{2t} + 0,043X_{3t}$$

Keterangan:

Y = Nilai Variabel Kemandirian Keuangan Daerah

X_{1t} = Nilai Variabel DAU

X_{2t} = Nilai Variabel DAK

X_{3t} = Nilai Variabel DANAIS

Uji F

Menurut hasil olah data, tingkat signifikansi regresi (Sig.) yang dihasilkan yakni sebesar $0,004 < \text{tingkat signifikansi penelitian } (\alpha) 0,05$.

Oleh sebab itu H₄ diterima, ini menunjukkan bahwa variabel DAU, DAK, dan DANAIS secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 2 Uji F

Hipotesis	Variabel	Tingkat Sig.		Keputusan
		Sig.	α	
H ₄	DAU, DAK, DANAIS	0,004	0,05	H ₄ diterima

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil dari uji t yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki tingkat signifikansi (Sig.) yakni 0,009 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi penelitian (α) 0,05. Lalu jika dilihat melalui persamaan matematisnya, DAU memiliki nilai koefisien sebesar -0,551. Kesimpulan ini mengartikan bahwa H₁ diterima yang artinya variabel DAU mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Oleh karena itu, jika terjadi kenaikan jumlah DAU, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan. Begitu pula dengan sebaliknya, penurunan pada DAU akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian yang didapat searah dengan penelitian oleh Ariani dan Putri (2010) dan Muliana (2009), dimana kedua penelitian tersebut menyimpulkan DAU mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah pusat menyalurkan DAU kepada daerah dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antardaerah serta digunakan sebagai pendanaan atas keperluan daerah dalam mewujudkan desentralisasi. Akan tetapi, pemerintah daerah justru bergantung dengan DAU yang diberikan sehingga kemandirian keuangan daerah menjadi lemah. DAU seharusnya dijadikan sumber untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, tetapi bukan berarti pemerintah daerah dapat sepenuhnya mengandalkan penyaluran DAU.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel DAK mempunyai tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,035 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi penelitian (α) 0,05. Lalu jika dilihat melalui persamaan matematisnya, DAK memiliki nilai koefisien sebesar -0,026. Dapat ditarik kesimpulan bahwa H_2 diterima yang artinya variabel DAK mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, apabila jumlah DAK bertambah, maka akan terjadi penurunan pada Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil yang didapat pada penelitian ini searah dengan penelitian oleh Sari (2015), Yulianto (2018), dan Marizka (2013).

Pengalokasian DAK bertujuan sebagai pendanaan kegiatan khusus yang termasuk dalam urusan daerah yang memenuhi prioritas nasional. Jumlah DAK apabila meningkat akan berdampak pada penurunan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemandirian Keuangan Daerah. Sebaliknya, penurunan pada jumlah DAK akan mengakibatkan peningkatan pada Kemandirian Keuangan Daerah. Hal tersebut terjadi karena sumber penerimaan utama pemerintah daerah adalah dana dari pemerintah pusat, sehingga masih terdapat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Sari, 2015).

Pengaruh Dana Keistimewaan (DANAIS) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut hasil uji t yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwasanya variabel Dana Keistimewaan (DANAIS) memiliki tingkat signifikansi (Sig.) yakni 0,081 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi penelitian (α) 0,05. Kesimpulan ini mengartikan bahwa H_3 ditolak yang berarti bahwa variabel Dana Keistimewaan (DANAIS) tidak mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil yang didapatkan sesuai dengan penelitian oleh Prastiwi dan Aji (2020). Lalu jika dilihat melalui persamaan matematisnya, Dana Keistimewaan (DANAIS) memiliki nilai koefisien sebesar 0,043. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila DANAIS meningkat, maka Kemandirian Keuangan Daerah juga meningkat. Menurut Kariem dan Purwaningsih (2018), penyaluran Dana Keistimewaan yang selalu meningkat tiap tahun sejak 2013-2017 tidak memberikan pengaruh terhadap angka kesenjangan dan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi DIY. Ini membuktikan bahwa Pemerintah masih belum optimal dalam memanfaatkan Dana Keistimewaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan (DANAIS) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi regresi (Sig.) yang diperoleh yakni 0,004 lebih rendah dari tingkat signifikansi penelitian (α) 0,05. Hasil uji F membuktikan bahwa variabel DAU, DAK, dan DANAIS secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah. Hal tersebut mengartikan bahwa H_4 diterima. Penelitian ini mempunyai hasil yang sesuai dengan penelitian oleh Marizka (2013), dan Susanti, Rahayu, dan Yudowati (2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. DAU mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY.
- b. DAK mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY.
- c. DANAIS tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi DIY.
- d. DAU, DAK, dan DANAIS secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan

Keterbatasan yang ditemui pada penelitian ini ialah sampel dalam penelitian ini hanya sedikit yaitu menggunakan data dari tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Hal ini dikarenakan terdapat kesulitan dalam memperoleh data apabila menggunakan data yang lebih luas serta kendala jangka waktu pengambilan data. Selain itu, terjadinya wabah Covid-19 juga menjadi kendala dalam pengambilan data karena diadakan pembatasan kegiatan di luar rumah.

Saran

- a. Bagi Penelitian berikutnya disarankan agar mempertimbangkan untuk mengambil data yang lebih luas seperti mengambil dari tingkat kabupaten atau kota.
- b. Bagi Penelitian berikutnya disarankan untuk meneliti daerah lain yang mendapatkan dana otonomi khusus agar bisa dijadikan perbandingan.
- c. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kemandirian keuangan daerah pada Provinsi DIY masih termasuk di kategori rendah, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan hal ini dan tidak sepenuhnya bergantung kepada transfer dana dari pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk menggunakan Dana Keistimewaan (DANAIS) sebagai alat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- [BPKA] Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. 2013-2018. *Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2018*.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2010). Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 364–369.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi Kedua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Gudono. (2014). *Analisis Data Multivariat*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Gujarati, D. (2003). *Basic Econometrics*. New York: Mc-Grawhill.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 61–81.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*, 84, 1-23.
- Muliana. (2009). Muliana : Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Provinsi Sumatera Utara, 2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Medan.

Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–10.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan*.

Ritonga, I., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: an Exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37–50.

Sari, P. I. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*, 13.

Siregar, B. (2006). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, D. B., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *e-Proceeding of Management*, 3(3), 3308–3314.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yulianto, A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

